



JURNAL FAIRNESS

ISSN (print): 2303-0348;

ISSN (online): 2303-0372

Available online at <https://ejournal.unib.ac.id/fairness>

PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI PROVINSI BENGKULU

¹ Afri Darmawan  ² Nila Aprilla 

^{1,2,3} Universitas Bengkulu

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history:

Received: 24 Mei 2023

Revised: 24 Mei 2023

Accepted: 24 Mei 2023

Keywords:

Administration of financial statement; Financial control and Performance

Correspondence:

Afri Darmawan
Universitas Bengkulu
afridarmawan@gmail.com

The objective of this study was to prove the influence of the administration of financial statement and financial control on the performance of Local Government Organization at the Bengkulu Province. The data used in this study was primary data obtained from the distribution of questionnaires to the financial managers of Local Government Organization at the Bengkulu Province. The number of samples used in this study was 108 peoples. However, from the result of the distribution of questionnaires, it was found that the number of samples that was feasible to be analyzed was only 96 peoples. The method of data analysis used was descriptive analysis and multiple regression analysis.

The obtained results of the study were: (1) the administration of financial statement has a significant influence on the performance of local government organizations in the Bengkulu Province and (2) the financial control has significant influence on the performance of local government organizations in the Bengkulu Province.

1. PENDAHULUAN

Secara umum keberhasilan penerapan Permendagri No. 59 Tahun 2007 ditunjukkan oleh kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya masing-masing melalui peningkatan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk faktor-faktor produksi dan keadilan. Disamping faktor produksi dan keadilan, masih terdapat beberapa faktor yang juga dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan Permendagri No. 59 Tahun 2007 yaitu komitmen karyawan, sumber daya manusia, regulasi, dan perangkat pendukung.

Selain pengelolaan keuangan daerah, faktor lain yang turut mendukung, Sistem pengendalian intern pada pemerintah juga sangat diperlukan guna mendapatkan pengelolaan

keuangan daerah yang efektif dan efisien. Sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal yang baik dalam suatu pemerintahan akan mampu menciptakan keseluruhan proses kegiatan yang baik pula, sehingga akan memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya pengamanan aset Negara dan keandalan laporan keuangan daerah pemerintah, dalam hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi pengelolaan keuangan daerah.

Pengawasan keuangan daerah terkait dengan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dilakukan pada semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (Mardiasmo, 2005).

Salah satu komponen pengendalian internal yaitu aktivitas pengawasan yang berhadapan dengan penilaian berkala atau berkelanjutan dari mutu penampilan/prestasi pengendalian internal oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu beroperasi seperti diharapkan dan mereka dimodifikasi sesuai dengan perubahan dalam kondisi-kondisi tertentu (Arens, 2003:412). Komponen pengendalian internal yang lain, terdapat bentuk aktivitas pengendalian yaitu pemisahan tugas yang berguna untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan usaha untuk menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan tugas oleh orang-orang terkait yang akan mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan yang dihasilkan.

Pengawasan dalam sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pembinaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah harus dilakukan secara terus-menerus (series of actions and on going basis). Disamping itu, diperlukan perubahan pola pikir (mind set) Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (early warning) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (Mardiasmo, 2005).

Pengawasan keuangan dilakukan bukan karena rendahnya tingkat kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pengelola keuangan daerah. Upaya ini merupakan fungsi yang melekat pada APIP yang harus dijalankan dengan baik (Mahmudi, 2010). Dari uraian tersebut, maka pada penelitian ini pembahasan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan dan pengawasan sebagai variabel yang mempengaruhi kinerja OPD pada objek penelitian.

Penelitian mengenai kinerja OPD, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah pernah dilakukan oleh Arfianti (2011) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja OPD pemerintah daerah di Kabupaten Batang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja OPD pemerintah daerah, sedangkan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh.

Penelitian yang dilakukan oleh Indriasari (2008) di Kota Palembang dan Ogan Hilir yang meneliti pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan terhadap kinerja OPD pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pengelolaan keuangan dan pengawasan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja OPD pemerintah daerah, sedangkan kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh. Haykal (2007) melakukan penelitian tentang analisis peran dan fungsi OPD dalam pengelolaan Keuangan Daerah serta pengaruhnya terhadap kinerja OPD (Studi kasus pada Pemkab Aceh Timur). Hasil penelitian tersebut bahwa perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja OPD.

Pangastuti (2008) melakukan penelitian tentang pengaruh partisipasi penganggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajemen pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai moderator (Studi pada Kabupaten Timor Tengah Utara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi penganggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja OPD. Penelitian lainnya dilakukan oleh Putra dkk (2015); Jayanti dkk (2016); Wiguna, Yuniartha dan Darmawan (2015); Hidayat (2015) dan Sutriningsih (2015) menunjukkan bahwa penatausahaan keuangan dan pengawasan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dari hasil penelitian terdahulu tersebut, diketahui bahwa pengelolaan anggaran dan pengawasan keuangan APIP sangat berpengaruh besar dalam peningkatan kinerja OPD. Berdasarkan dari hal tersebut, penelitian ini diberi judul Pengaruh Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Keuangan terhadap Kinerja organisasi perangkat daerah di Provinsi Bengkulu.

2. KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Agency Theory

Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu: 1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan 2) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas akuntabilitas horizontal).

Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk melakukan pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan Politik diperlukan Informasi Akuntansi yang salah satunya berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2009 : 162-163).

2.2 Kinerja Organisasi Sektor Publik

Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap dengan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintah (Mardiasmo, 2005). Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Kinerja sektor publik sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja aparat atau manajerial. Unit-unit kerja organisasi publik diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dengan mensinergikan kemampuan pimpinan dan kemampuan bawahan (Mahmudi, 2010).

Menurut Bastian (2006) kinerja OPD adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Ukuran kinerja suatu organisasi sangat penting, hal ini dimaksudkan sebagai evaluasi atas input (masukan) program yang telah dilakukan serta evaluasi terhadap output (keluaran) dari program tersebut.

Kinerja sektor publik didasarkan pada kinerja aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah sebagai pelaksana dari kegiatan pemerintahan bertanggung jawab untuk mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif dengan menginteraksikan kemampuan pimpinan dan kemampuan bawahan.

Dalam penelitian ini, kinerja OPD didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan No. 248/PMK.07/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 88/KMK.01/2013 yang terdiri dari pengelolaan anggaran; pengelolaan kas; transparansi; akuntabilitas dan kapasitas pengelola keuangan. Indikator tersebut digunakan dalam penelitian Wiguna, Yuniartha dan Darmawan (2015), sebagaimana terangkum pada Tabel 1.

Tabel 1
Dimensi dan Indikator Variabel Kinerja Pemerintah Daerah

Dimensi	Indikator	Sumber
Pengelolaan anggaran	- Pengelolaan anggaran telah dilaksanakan dengan baik - Anggaran OPD telah terserap dengan baik - Rencana program kerja telah terealisasi dengan baik	Keputusan Menteri Keuangan RI No. 88/KMK.01/2013 Diadopsi dari penelitian Wiguna, Yuniartha dan Darmawan (2015)
Pengelolaan kas	- Setiap penarikan kas dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku - Jumlah uang kas yang tersimpan pada bendahara tidak melebihi jumlah yang telah ditentukan - Setiap pembelanjaan secara kas dibuktikan dengan bukti transaksi secara jelas	

Dimensi	Indikator	Sumber
Transparansi	- Setiap bidang di OPD mengetahui program kerja anggaran yang ditetapkan - Setiap pegawai mengetahui secara jelas jumlah pagu anggaran yang diperuntukkan di tiap OPD - Pengelolaan dana anggaran dilakukan secara transparan dan dikomunikasi secara internal dengan baik	
Akuntabilitas	- Penggunaan dana anggaran dilakukan secara bertanggung jawab - Laporan pertanggungjawaban dilakukan tepat waktu - Laporan pertanggungjawaban dilakukan secara jujur	
Kapasitas pengelola keuangan	- Jumlah pengelola keuangan mencukupi dalam pelaksanaan kegiatan - Kompetensi pengelola keuangan telah memadai dalam pengelolaan keuangan - Pembagian kerja telah dilaksanakan secara efektif	

12.3 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 1 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah." Sedangkan menurut Halim (2002:7) pengertian pengelolaan keuangan daerah adalah merupakan pengelolaan anggaran daerah (APBD).

Dalam penelitian ini, pengukuran pengelolaan keuangan OPD didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Indikator tersebut digunakan dalam penelitian Wiguna, Yuniartha dan Darmawan (2015), sebagaimana terangkum pada Tabel 2.

Tabel 2
Dimensi dan Indikator Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah

Dimensi	Indikator	Sumber
Menerima	- Proses penerimaan anggaran - Ketepatan perhitungan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) - Kelengkapan Dokumen Pendukung Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM)	Permenda gri No. 21 Tahun 2011 Diadopsi dari penelitian Wiguna, Yuniartha dan
Menyimpan	- Uang persediaan yang dicadangkan telah dilakukan dengan baik - Setiap transaksi pembelanjaan disertai dengan bukti dan disimpan dengan baik - Setiap bukti setoran pajak disimpan dan didokumentasikan dengan baik	

	- Dokumen pertanggungjawaban dibuat dengan baik	Darmawan (2015)
Membayarkan	- Pembayaran uang persediaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku - Pembayaran belanja tidak langsung dilakukan secara memadai - Pembayaran belanja langsung dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku	

Dimensi	Indikator	Sumber
Menyerahkan	- Bendahara pengeluaran akan langsung melakukan pengambilan yang tunai sesuai dengan SPM yang diterimanya - Uang yang telah diambil oleh bendahara diserahkan kepada pengelola kegiatan/program sesuai mekanisme yang berlaku	
Mempertanggungjawabkan	- Laporan pengelolaan keuangan dilakukan secara administratif - Laporan pengelolaan keuangan dilakukan secara fungsional kepada pihak yang berkepentingan - Laporan realisasi belanja didukung dengan bukti yang actual	

2.4 Pengawasan Keuangan Daerah

Undang-Undang No. 17 Tahun 2004, tentang Keuangan Negara Dalam pasal 1 menjelaskan "bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut". Pengertian APBD dalam konteks UU Keuangan Negara pasal 1 ayat (8) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ruang lingkupnya pengawasan keuangan negara dapat dibedakan menjadi Pengawasan Internal dan Pengawasan eksternal (Fathurrochman, 2002). Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2002). Pengawasan yang dilakukan dapat dimulai saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD dan pertanggungjawaban APBD.

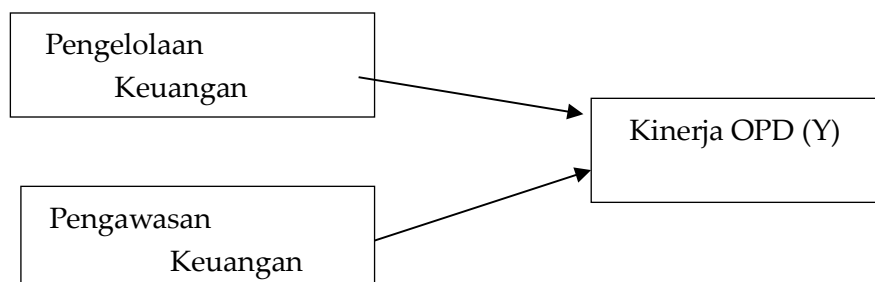
Dalam penelitian ini, pengawasan keuangan OPD didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem Pengawasan Keuangan Daerah. Indikator tersebut digunakan dalam penelitian Wiguna, Yuniartha dan Darmawan (2015), sebagaimana terangkum pada Tabel 3.

Tabel 3
Dimensi dan Indikator Variabel Pengawasan Keuangan Daerah

Dimensi	Indikator	Sumber
Pengawasan terhadap pengaturandan penetapan	- Pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan dengan baik - Pemantauan dilakukan untuk melihat apakah penetapan rencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 2007
Pengawasan terhadap Perencanaan dan Penganggaran	- APIP melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen perencanaan yang ada di OPD - APIP melaksanakan pemantauan terhadap rencana kerja anggaran yang akan dilaksanakan oleh OPD	Diadopsi dari penelitian Wiguna,
Pengawasan terhadap Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	- APIP memantau dokumen pelaksanaan dalam setiap kegiatan OPD - APIP memastikan bahwa dokumen pelaksanaan dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipercaya	Yuniartha dan Darmawan (2015)
Pengawasan terhadap pertanggungjawaban keuangan daerah	- Laporan pertanggungjawaban akan diperiksa sebelum diaudit oleh instansi terkait - Laporan keuangan daerah ditelaah secara mendalam dengan melampirkan bukti-bukti yang sah	
Pengawasan terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah	- Setiap Pendapatan yang diperoleh dari daerah maupun pusat diawasi pelaksanaannya - Setiap penggunaan uang untuk belanja dianalisis sesuai dengan ketentuan pengawasan	

2.6 Kerangka Analisis

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai pengaruh pengelolaan keuangan dan pengawasan keuangan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah, maka dapat digambarkan model penelitian ini :



Gambar 1

Kerangka Analisis

Dari gambar kerangka analisis di atas dapat dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja OPD, baik secara parsial maupun simultan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian survey. Menurut Zikmund (2010) metode penelitian survey adalah suatu bentuk teknik penelitian dimana informasi dikumpulkan dari sejumlah sampel berupa orang, melalui pertanyaan-pertanyaan. Survey pada penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan datanya. Tujuannya adalah memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini mengenai tanggapan responden tentang pengelolaan keuangan daerah, pengawasan keuangan dan kinerja OPD.

Populasi penelitian ini adalah Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah di provinsi Bengkulu. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah menggunakan teknik sensus. Sensus adalah teknik penentuan sampel dengan mengambil populasi sebagai sampel penelitian. Pertimbangannya adalah Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Bengkulu dapat mewakili dalam pengukuran kinerja OPD. OPD pada pemerintah provinsi Bengkulu adalah sebanyak 35 OPD, sehingga jumlah responden yang menjadi sampel dalam penelitian adalah sebanyak 35 orang responden.

Analisis regresi yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda, yang bertujuan menguji pengaruh pengelolaan keuangan dan pengawasan keuangan terhadap kinerja OPD, persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

- Y = Kinerja OPD
- X1 = Pengelolaan Keuangan
- X2 = Pengawasan Keuangan
- A = Konstanta
- b_{1,2} = Koefisien Regresi
- e = Error Term

4. HASIL

Analisis multivariate yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil perhitungan regresi adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Hasil Analisis Regresi dan Pengujian Hipotesis

No	Independent Variable	Nilai		
		Coeff	t-stat	p-value
1	Pengelolaan Keuangan	1,136	4,149*	0,000
2	(X1)Pengawasan Kuangan (X2)	0,546	2,198*	0,035
Konstanta (a)			15,968	
Adjusted R-Squared			0,467	
F-Statistic			15,901	
Prob (F-statistic)			0,000	

Sumber: Hasil Penelitian 2019, diolah

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 15,968 + 1,136X_1 + 0,546X_2$$

Persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut: Nilai konstanta (a) sebesar 15,968 menunjukkan bahwa jika pengelolaan keuangan dan pengawasan keuangan sama dengan nol (0) maka kinerja OPD akan konstan (tetap) sebesar 15,968. Artinya, tanpa pengelolaan keuangan dan pengawasan keuangan, kinerja OPD cenderung tidak meningkat.

Nilai koefisien regresi (b1) variabel pengelolaan keuangan sebesar 1,136 menunjukkan bahwa jika pengelolaan keuangan semakin meningkat, maka kinerja OPD di Provinsi Bengkulu semakin meningkat. Selanjutnya, nilai koefisien regresi (b2) variabel pengawasan keuangan sebesar 0,546 menunjukkan bahwa jika pengawasan keuangan semakin meningkat, maka kinerja OPD di Provinsi Bengkulu semakin meningkat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t-hitung variabel pengelolaan keuangan sebesar 4,149 dengan probabilitas (signifikansi) sebesar 0,000. Hasil tersebut menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja OPD. Hal ini dibuktikan dengan nilai nilai sig. $0,000 < 0,05$. Sedangkan nilai koefisien regresi yang diperoleh sebesar 1,136 yang berarti bahwa pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja OPD adalah positif. Dengan demikian disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) dapat diterima. Hasil ini berarti bahwa jika pengelolaan keuangan daerah meningkat maka kinerja OPD juga meningkat.

Variabel variabel pengawasan keuangan mendapatkan nilai t-hitung 2,198 dengan probabilitas (signifikansi) sebesar 0,035. Hasil tersebut menyimpulkan bahwa pengawasan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja OPD. Hal ini dibuktikan dengan nilai nilai sig. $0,035 < 0,05$. Sedangkan nilai koefisien regresi yang diperoleh sebesar 0,546 yang berarti bahwa pengaruh pengawasan keuangan terhadap kinerja OPD adalah positif. Dengan demikian disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H2) dapat diterima. Hasil ini berarti bahwa jika pengawasan keuangan daerah meningkat maka kinerja OPD juga meningkat

4.1 Pembahasan

4.1.1 Pengaruh Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja OPD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja OPD di Provinsi Bengkulu. Hasil ini bermakna bahwa jika pengelolaan keuangan semakin baik, maka kinerja OPD akan semakin baik. Data hasil statistik deskriptif pada variabel penatausahaan keuangan menunjukkan bahwa secara umum penatausahaan keuangan pada OPD Provinsi Bengkulu berada pada kategori tinggi.

Dari hasil tersebut diketahui bahwa pengelolaan keuangan harus dilakukan dan disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil ini berarti informasi laporan keuangan dapat berguna dalam memprediksi penggunaan anggaran di masa depan, hal ini disebabkan sebagian besar program kerja di tiap-tiap OPD sama dengan tahun-tahun sebelumnya seperti belanja langsung dan belanja tidak langsung. Laporan keuangan yang dibuat oleh OPD di Provinsi Bengkulu berpedoman pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja pengelola keuangan OPD. Mardiasmo (2002) menegaskan bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula. Ini berarti penatausahaan keuangan daerah memiliki posisi strategis dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang akuntabel. Untuk dapat menyajikan informasi keuangan yang memadai dalam bentuk pelaporan keuangan yang dapat dipahami oleh

pengguna laporan keuangan, maka penyajian harus dilakukan oleh orang yang memahami penatausahaan keuangan daerah dan sistem akuntansi pemerintahan, khususnya akuntansi keuangan daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indriasari (2008); Wiguna, Yuniartha dan Darmawan (2015); Hidayat (2015) dan Sutriningsih (2015) bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja. Baik hasil penelitian ini maupun penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang semakin baik, akan dapat meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja OPD Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu. Hal ini bermakna jika pengelolaan keuangan semakin baik, maka kinerja OPD akan semakin meningkat.

4.1.2 Pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja OPD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja OPD di Provinsi Bengkulu. Hasil ini bermakna bahwa jika pengawasan keuangan semakin baik, maka kinerja OPD akan semakin baik. Selanjutnya, dari hasil analisis statistik deskriptif diketahui bahwa pengawasan keuangan berada pada kategori tinggi. Hasil ini berarti bahwa pelaksanaan pengawasan keuangan pada OPD Provinsi Bengkulu telah dilakukan terhadap rencana kerja dan pelaksanaannya di lapangan, sehingga dapat meningkatkan kinerja OPD.

Untuk menjamin pelaksanaan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu dilakukan upaya pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah. Salah satu bentuk pengawasan yang sangat penting perannya adalah pengawasan intern pemerintah. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya good governance dan clean government dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pengawasan intern Pemerintah merupakan fungsi yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintah. Mekanisme pelaksanaan pengawasan dilaksanakan langsung oleh aparatur pengawas intern atau sering disebut dengan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP). APIP merupakan pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional tertentu yang diberi tugas, wewenang, tanggungjawab dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap instansi pemerintah untuk dan atas nama negara (Permenpan No: PER/05/M/PAN/03/2008).

Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Artinya, pengawasan keuangan dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara tepat. Pengawasan terhadap pertanggungjawaban keuangan daerah pada variabel pengawasan keuangan terdiri dari memantau kegiatan dan memastikan kelengkapan administrasi dalam pertanggungjawaban laporan keuangan. Tanggapan responden terhadap dimensi ini berada pada kategori sangat sesuai prosedur. Hasil ini berarti bahwa pelaksanaan pengawasan keuangan pada OPD Provinsi Bengkulu telah dilakukan terhadap kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan pelaporan.

Kinerja OPD yang semakin meningkat menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dan pengawasan keuangan yang telah dijalankan oleh auditor intern telah berjalan dengan baik, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Berkaitan dengan hal tersebut, Menurut Mardiasmo (2005) terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Pemeriksaan (*audit*) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Inspektorat diamanatkan UU No. 15/ 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh entitas pelaporan.

Pengawasan dan pengendalian ini tidak hanya menghasilkan opini atas laporan keuangan dan laporan keuangan yang diaudit dari BPK-RI tetapi juga memberikan catatan hasil temuan. Jika dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tersebut terdapat temuan, maka hal menjelaskan kelemahan dari pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Inspektorat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Indriasari (2012); Wiguna, Yuniartha dan Darmawan (2015); Putra dkk (2016) dan Sutriningsih (2015) bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja OPD, semakin baik pemahaman aparatur terhadap penatausahaan keuangan daerah maka semakin baik pula kinerja pengelolaan keuangan daerah.

5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN KETERBATASAN PENELITIAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja OPD di Provinsi Bengkulu. Hasil ini berarti bahwa jika pengelolaan keuangan semakin baik, maka kinerja OPD semakin baik pula.
- 2) Pengawasan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja OPD di Provinsi Bengkulu. Hasil ini berarti bahwa pengawasan keuangan yang dilakukan pada pengelolaan keuangan di tiap-tiap OPD mampu meningkatkan kinerja OPD pada OPD yang bersangkutan.

5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, implikasi hasil penelitian yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah selaku entitas pelaporan keuangan daerah terutama dalam meningkatkan kinerja OPD adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari penatausahaan keuangan daerah memegang peran penting dalam proses keuangan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang memadai, setiap pengelola keuangan harus mampu membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dengan baik, melengkapi laporan keuangan dengan dokumen-dokumen pendukung seperti SPP, SPM dan surat setor pajak serta melaksanakan pembayaran terhadap belanja langsung dilakukan oleh OPD sesuai dengan mekanis yang berlaku.
- 2) Pengawasan keuangan perlu dilakukan sebagai bagian dalam sistem pengendalian internal yang diarahkan agar penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pengelola keuangan OPD berjalan dengan baik. Pengawasan keuangan yang

dilakukan sebagai pemberi peringatan dini (early warning) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mungkin dilakukan oleh pengelola keuangan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian yang akan datang. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Penilaian kuesioner berkaitan dengan variabel penelitian didasarkan pada pendapat responden pegawai pengelola keuangan daerah sendiri, sehingga hasil penilaian tidak objektif dapat saja terjadi. Oleh karena itu, pengukuran variabel juga diambil dari persepsi auditor pemeriksa keuangan.
- 2) Penelitian ini hanya menggunakan variabel pengelolaan keuangan dan pengawasan keuangan yang mempengaruhi kinerja OPD, sementara faktor- faktor lain yang turut mempengaruhi kinerja OPD relatif banyak. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya dapat menambah variabel yang belum dimasukkan dalam penelitian, seperti kompetensi, komitmen dan sebagainya.

5.4 Saran

Dari hasil penelitian kesimpulan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan keuangan perlu dipertahankan dan ditingkatkan, karena jika pengelolaan keuangan baik, maka kinerja yang dihasilkan pun akan semakin baik. Oleh karena itu, sangat diperlukan oleh pengelola keuangan untuk menghasilkan pengelolaan keuangan yang baik. Penempatan pengelolaan keuangan harus tepat sesuai dengan kompetensi dan keahliannya seperti memiliki keserjanaan pendidikan akuntansi, memperoleh diklat keuangan, diklat SIMDA dan sebagainya.
- 2) Pengawasan diperlukan agar penyelenggaraan pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pengawasan dilakukan secara optimal, agar pelaksanaan pengelolaan keuangan berjalan baik sehingga kinerja yang dihasilkan juga baik. Pengawasan dalam sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengawasan dapat dilakukan secara berkala, accidental maupun terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B., 2004. *Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat, dan Rekayasa*. Yogyakarta : BP STIE YKPN
- Alamsyah, 1997. *Mekanisme Pengawasan APBD di Kabupaten Sleman*, Tesis, Yogyakarta, PPS UGM
- Arens, Alvin, 2003. *Auditung : An Integrated Approach, 12th Edition*, Prentice-Hall, International, New Jersey.
- Arfianti. (2011). *Pengaruh Penatausahaan Keuangan dan Kualitas SDM Terhadap Kinerja Pengelola Keuangan OPD*. Kabupaten Batang.

- Bastian, Indra, 2006. *Manajemen Keuangan Publik*, Andi Offset, Yogyakarta
- Domai, A., 2002. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, Edisi keempat*. Yogyakarta :Yayasan Penerbit FE UGM.
- Dwiyanto, A., 2015. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta: UGM Press
- Ghozali, A. (2012). *Analisis Multivariate dengan Aplikasi SPSS*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Halim, Abdul, 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Andi Offset, Yogyakarta
- Halim, Abdul, 2004. *Manajemen Sektor Publik*, Andi Offset, Yogyakarta
- Haykal, M, 2007, Analisis Peran dan Fungsi OPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pengaruhnya terhadap Kinerja (Studi Kasus pada Pemkab Aceh Timur) Tesis, USU
- Indriasari, 2008. Pengaruh Kapasitas SDM, Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan terhadap Kinerja OPD di Kabupaten Ogan Komering Ilir, *Jurnal Universitas Sriwijaya*
- Keban, T.Y., 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media
- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 88/KMK.01/2013 *tentang* Pengelolaan Keuangan Daerah
- Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 *tentang* Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Kurniawan, T. (2007). Pergeseran, Paradigma Administrasi Publik; Dari Perilaku

Model Klasik Dan NPM Ke Good Governance. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. No. 23A/Dikti/KEP/2004. ISSN. 141-948X, Vol. 7. Hal. 16-17

Madiasmo. (2005). *Akutansi Sektor Publik*. Andi offset. Yogyakarta.

Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan daerah*. Erlangga. Jakarta.

Mardiasmo. (2002). Local Government Performance Measurement In The Era of Local Automy: The Case of Sleman Regerency Yokyakarta. *SOSIOSAINS*. 17 (1). Yogyakarta.

Pangastuti, 2008. Pengaruh Partisipasi Penganggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajemen dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi, *Jurnal Ekonomi Universitas Padjajaran Bandung*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 *tentang* Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Prasetyono dan Kompyurini, 2007. *Pengaruh Kejelasasn Sasaran, Desentralisasi, dan Sistem Pengukuran terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik (Studi Empiris di Politeknik Negeri Semarang)*. Tesis. Universitas Dipenogoro.

Primadana dkk, 2014. *Pengaruh Desentralisasi, Karakteristik Informasi Akuntansi Manajemen pada PT Alim Surya Steel*. *Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi* Vol 6, No 2 : 109-116.

Ratih, A.E. (2012). *Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Kinerja OPD pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau*. (Tesis Tidak Dipublikasikan)Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

Rohman, Abdul, 2007. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemda di Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Volume 9, Nomor 1, Pp. 24-32

Sari, E. (2013). *Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Penatausahaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pengelola Keuangan Daerah*(Tesis tidak dipublikasikan).Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.

Wiguna, M.B.S., G.A. Yuniartha, dan N.A.S. Darmawan, 2015. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, *e-Journal S1-Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 3 No. 1

Sekaran, U. (2006). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 4, Buku 1, Salemba Empat. Jakarta.

- Supardi, 2004. *Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Locus Of Control Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Pt Kimia Farma Trading Dan Distribution Cabang Makassar)*. Universitas Hasanuddin.
- Syahrida. (2011). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE. Yogyakarta.
- Tangkilisan, 2005. *Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Desentralisasi terhadap hubungan antara Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran dan Kinerja Manajerial*. Skripsi: FE UNP.
- Tuasikal, A. (2009). *Pengaruh pengawasan, pemahaman sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah. (Studi pada kabupaten dan kota provinsi maluku)*. Maluku.
- Tugiman, Hiro, 2000. *Pengaruh Desentralisasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Kupang)*. Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 13. No. 3: 363-369. Kupang. Politeknik Kupang.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 *tentang* Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang* Pemerintahan Daerah
- Warisno. (2009). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi* (tidak dipublikasikan) Universitas Negeri Jambi.
- Yani, Elva, 2002. Pengertian Kinerja. Tersedia online di <http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2113811-pengertian-kinerja/#ixzz0bUzzsCaC>
- Zikmund, W.G., & Barry, J.B. (2010). *Essentials of Marketing Research*. 4th Edition. Cengage Learning, South-Western.